



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jln. Demang Lebar Daun No.4864 Palembang

KATA PENGANTAR

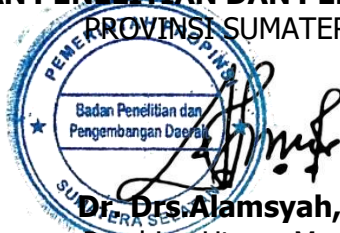
Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Prov. Sumsel telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Periode Tahun 2024.

LKJiP ini disusun sebagai wujud aplikasi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pada prinsip - prinsip *good governance* dan sebagai media pertanggungjawaban, sarana informasi Balitbangda dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu Balitbangda Prov. Sumsel mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga LKJiP Balitbangda ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Balitbangda.

Palembang, 03 Maret 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Dr. Drs. Alamsyah, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196806191993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Fungsi dan Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan	3
1.4 Isu-Isu Strategis	16
1.5 Keadaan Pegawai	17
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana	19
1.7 Keuangan	20
1.8 Sistematika LKJiP	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Daerah	22
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	24
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan indikator Balitbangda Prov. Sumsel.....	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Balitbangda Tahun 2024.....	38
3.1.1 Capaian Kinerja Daerah Balitbangda Tahun 2024	38
3.1.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	38
3.1.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Balitbangda Prov. Sumsel.....	39
Tujuan : Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Dalam Pembangunan	47
3.1.2.2 Capaian Indikator Kinerja Per Sasaran Balitbangda Prov.Sumsel..	44
Sasaran 2 Meningkatnya Hasil Penelitian yang dimanfaatkan ...	44
Sasaran 3 Meningkatnya Produk Inovasi yang Siap Dipasarkan....	52
Sasaran 4 Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang terpublikasi.....	58
Sasaran 5 Meningkatnya Fungsi Konservasi Kebun Raya Sriwijaya	59
Sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi.....	61
3.2. Capaian Kinerja Keuangan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	64
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024	69
BAB IV PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai harapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam dalam RPJMD 2019-2024. Indikator-indikator yang menjadi ukuran terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu setiap perangkat daerah menyusun rencana kegiatan baik rencana jangka pendek, maupun rencana jangka menengah (lima tahunan). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, secara fungsional tidak bersentuhan langsung dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tetapi memberi daya ungkit bagi SKPD lain untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Reformasi birokrasi mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak untuk menilai keberhasilan capaian program dan kegiatan untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian dimaksud sesuai atau tidak sesuai dengan harapan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban berhasil/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana

pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Balitbangda Prov. Sumsel. Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Balitbangda dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

Besaran susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Kerjasama;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan membawahi :
 1. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 2. Subbidang Pemerintahan Desa;
 3. Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi :
 1. Subbidang Sosial dan Budaya;
 2. Subbidang Kependudukan;
 3. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :

1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 3. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
1. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 2. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 3. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

1.3 FUNGSI DAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disahkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Mei 2011. Dan Sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 13 Desember 2016, nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;
- d. pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah provinsi;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan lingkup pemerintah provinsi;
- g. pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- b. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan

dan urusan akuntansi;

- c. melakukan pengelolaan dan penyiapan pelaporan keuangan dan tanggapan pemeriksaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat;
- b. melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan pengelolaan asset;
- e. melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- f. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
- g. melakukan pengelolaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan / atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- e. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- f. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas,, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(2) Subbidang Kependudukan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan,

- perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi

- kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 - d. melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

- e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi

- di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif,
- b. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dioperasionisasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, telah merubah pola penelitian yang ada. Dimana Bapda dan Balitbang melakukan sinergitas dalam melakukan penelitian yang disusun dengan memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penelitian Pembangunan Nasional.

Keterpaduan proses penelitian ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses penelitian. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah penelitian pembangunan yang dapat direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis penelitian dan pengembangan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk menuju kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian dalam hal ini Balitbang yang membantu Kepala Daerah dalam Penelitian Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Tugas dan fungsi Balitbang dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, yang aspiratif bagi pengguna layanan. Beberapa Isu Strategis yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, yaitu :

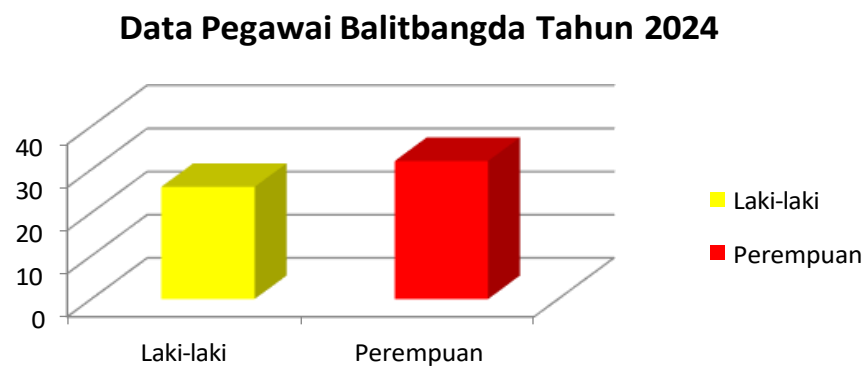
- a. Kompetensi SDM Peneliti belum mencukupi sesuai dengan yang dibutuhkan, motivasi masih rendah, sarana dan prasarana penelitian belum memadai serta

- pendanaan/anggaran masih sangat kecil (Minimal 1% dari total APBD).
- b. Keterbatasan Data Base sebagai data dan informasi pendukung kelitbangan belum seluruhnya tersedia dan terintegrasi
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
 - d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya pendukung tugas dan fungsi

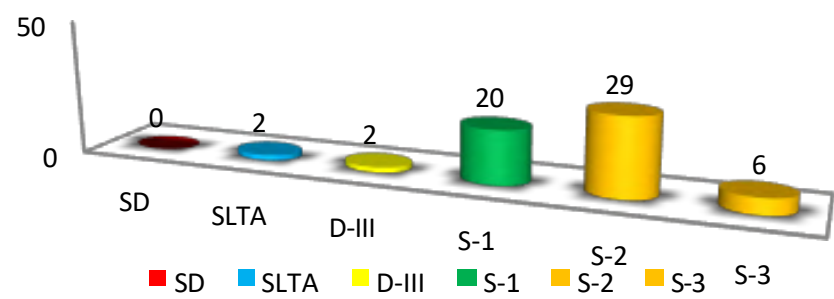
1.5 KEADAAN PEGAWAI

1.5.1 Susunan Kepegawaian

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir tahun 2024 memiliki kekuatan Pegawai Negeri Sipil berjumlah 58 orang yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Distribusi pegawai Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



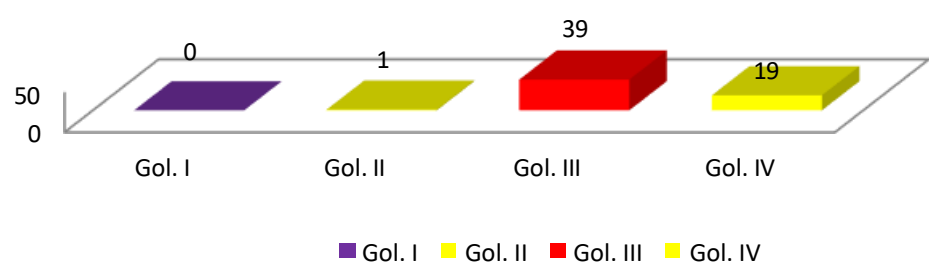
Grafik 1.5.1. Distribusi Pegawai Balitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.5.2. Distribusi Pegawai Balitbangda Berdasarkan Jenjang Tingkat Pendidikan

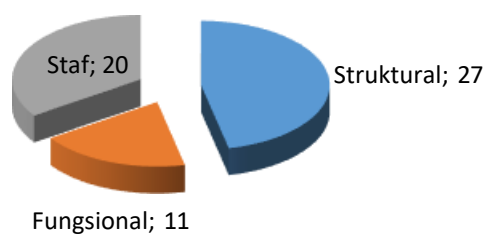
Dari grafik diatas menunjukkan Jenjang pendidikan yang terbanyak adalah pada pendidikan S-1 berjumlah 20 orang, pendidikan S-2 berjumlah 29 orang dan yang paling

sedikit adalah jenjang pendidikan S-3 berjumlah 6 orang. Sedangkan untuk distribusi pegawai Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan menurut golongan kepangkatan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



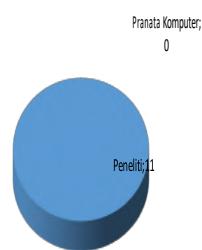
Grafik 1.5.3. Distribusi Pegawai Balitbangda Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Berdasarkan grafik di atas Jumlah pegawai Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagian besar golongan III berjumlah 39 orang, golongan IV berjumlah 18 orang, golongan II berjumlah 1 orang dan golongan I berjumlah 0 orang.



Grafik 1.5.4. Distribusi Pegawai Balitbangda Berdasarkan Fungsional

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya berjumlah 58 orang terdiri dari 27 orang pejabat struktural, 11 orang pejabat fungsional dan 20 orang staf.



Berdasarkan grafik di samping menunjukkan bahwa jumlah tenaga fungsional seluruhnya berjumlah 11 orang terdiri dari tenaga fungsional peneliti berjumlah 11 orang, dan dan fungsional pranata komputer berjumlah 0 orang.

1.6 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Hingga akhir tahun 2024, Aset yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang awalnya berasal dari ex Tugub Palembang, Dinas Penerangan, Biro Perlengkapan, Mawil Hansip dan pengadaan/ pembelian Balitbangda sebagai berikut :

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Desember 2024
		Harga (Ribuan)
1	Tanah	106.377.654.596,00
2	Alat-Alat Besar	1.191.568.000,00
3	Alat-Alat Angkutan	2.768.536.676,00
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	445.370.000,00
5	Alat Pertanian	1.564.180.750,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.431.319.303,00
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	779.764.414,28
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.100.000,00
9	Alat Laboratorium	2.392.280.325,00
10	Komputer	1.665.192.197,16
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	17.736.500,00
12	Alat Keselamatan Kerja	91.500.000,00
13	Bangunan Gedung	27.732.935.077,95
14	Monumen	2.823.399.900,00
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.385.867.000,00
16	Jalan Dan Jembatan	4.573.145.693,08
17	Bangunan Air/Irigasi	1.190.049.390,00
15	Instalasi	932.256.000,00
16	Jaringan	1.348.147.442,00
17	Aset Tidak Berwujud	2.547.181.500,00
18	Aset Lain	1.164.343.225,00
Total		166.437.915.889,47

Berdasarkan Kondisi (Baik, Kurang baik dan Rusak) Asset Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Kondisi	Jumlah	Persentase
1	Baik	2235	95,07 %
2	Kurang Baik	42	1,78 %
3	Rusak Berat	74	3,15 %

Asset Balitbangda terdiri dari Asset Belanja Modal dan Asset Hibah. Total Asset tahun 2024 berjumlah 2.351 jenis barang, asset yang dikuasai Balitbangda tersebar di 3 lokasi yaitu Balitbangda, UPTB Science Techno Park, dan UPTB Kebun Raya Sriwijaya. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan asset Balitbangda yang berkondisi baik berjumlah 2.235 jenis, Kondisi Kurang Baik/Rusak Ringan berjumlah 42 Jenis, sementara jumlah asset dalam kondisi rusak berjumlah 74 jenis.

1.7 KEUANGAN

Berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2024 alokasi untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 20.513.762.889,-** (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Belanja operasi	: Rp.	20.170.463.889,-
Belanja modal	: Rp.	390.800.000,-
Total Anggaran	: Rp.	20.513.762.889,-
Realisasi	: Rp.	18.342.505.473,-

Realisasi keuangan sebesar **Rp. 18.342.505.473,-** (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut, realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 18.318.224.473,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 90,82%, sedangkan realisasi keuangan anggaran belanja modal sebesar Rp. 84.861.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 21,71% dari total belanja modal.

1.8 SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Balitbangda Prov. Sumsel Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematisa penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAERAH

Perencanaan Strategis disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. strategi, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Balitbangda dan dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengertian Visi adalah serangkaian kata yang menunjuk-kan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi atau organisasi terkandung Pikiran-pikiran dan gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024 yaitu

“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Sumsel Maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya pusat kebudayaan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang, Balitbangda sebagian besar mendukung pencapaian misi I, namun Balitbangda turut berkontribusi untuk mewujudkan misi lainnya. Selanjutnya ini diperlihatkan hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPMD dengan Indikator Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.	Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Jumlah Litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus	1.1 Maju ekonomi kerakyatan (meningkatnya ekonomi kerakyatan) 1.2 Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan (Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan) 1.3 Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan kedaulatan pangan) 1.4 Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan) 1.5 Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi)	1) Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan 2) Jumlah Hasil Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi 3) Jumlah Hasil Litbang Bidang Pertanian 4) Jumlah Hasil Litbang Bidang Energi
MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung	Tujuan 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		3.1 Maju Pelayanan Publik berkualitas (Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas) 3.2. Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel (Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas)	1) Jumlah Hasil Litbang Bidang Pemerintahan 2) Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosial 3) Jumlah Hasil Litbang Bidang

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.			3.3 Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas (Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah) 3.4 Maju Kesehatan Masyarakat (Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat) 3.5 Maju Akses Pendidikan Berkualitas (Meningkatnya akses pendidikan berkualitas) 3.6 Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup) 3.7. Maju Infrastruktur dan Konektivitas (Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas)	Kesehatan 4) Jumlah Hasil Litbang Bidang Pendidikan 5) Jumlah Hasil Litbang Bidang Lingkungan Hidup 6) Jumlah Hasil Litbang Bidang Infrastruktur

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Sumsel

2.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024 dan Cascade Kinerja Balitbangda maka tujuan dan sasaran Balitbangda Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu **“Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan”** sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan Invensi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja :

Indeks Inovasi Daerah

2. Sasaran :

Tabel 2.2 Sasaran Balitbangda Prov. Sumsel

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
							2019	2020	2021	2022	2024
1	Meningkatkan Invensi dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah			1.1.1	Indexs Inovasi Daerah	8,4	8,5	24.100	24.200	24.500
			2	Meningkatnya Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	1.2.1	Jumlah Hasil Penelitian Balitbangda/Lemlit/Perguruan Tinggi yang dimanfaatkan pada tahun berjalan (n) ditambah tahun sebelumnya (n-1)	55	62	69	76	83
					1.2.2	Jumlah Desa Inovasi	-	17	1	1	1
			3	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.3.2	Nilai Ekosistem Inovasi	-	3	4	4,2	4,5

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
							2019	2020	2021	2022	2024
			4	Meningkatnya produk inovasi yang siap dipasarkan	1.2.1	Jumlah Prototype yang memenuhi TRL (memenuhi Level 9)	-	1	1	1	1
			5	Meningkatnya hasil kelitbangan Bidang Sosial yang terpublikasi	1.5a.1	Jumlah Pemakalah dipertemuan ilmiah terindeks global	-	2	3	4	5
					1.5a.2	Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	-	1	2	3	4
					1.5b.3	Jumlah KTI diterbitkan di prossiding ilmiah terindeks global	-	1	2	3	4
					1.5a.4	Jumlah Buku Ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal	-	1	2	3	4
					1.5a.5	Jumlah Pemakalah dipertemuan ilmiah eksternal instansi	-	14	15	16	17
					1.5a.6	Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	-	10	12	14	16

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
							2019	2020	2021	2022	2024
					1.5a.7	Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	-	2	3	4	5
					1.5a.8	Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal	-	1	2	3	4
			Meningkatnya hasil kelitbangan Bidang Alam yang terpublikasi		1.5b.1	Jumlah Pemakalah dipertemuan ilmiah terindeks global	-	1	2	3	4
					1.5b.2	Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	-	1	2	3	4
					1.5b.3	Jumlah KTI diterbitkan di prossiding ilmiah terindeks global	-	1	2	3	4
					1.5b.4	Jumlah Buku Ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal	-	0	1	2	3
					1.5b.5	Jumlah Pemakalah dipertemuan ilmiah eksternal instansi	-	11	12	13	14

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
							2019	2020	2021	2022	2024
					1.5b.6	Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	-	2	3	4	5
					1.5b.7	Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	-	1	2	3	4
					1.5b.8	Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal	-	0	1	2	3
				Meningkatnya hasil kelitbangan Bidang Teknik yang terpublikasi	1.5c.1	Jumlah Pemakalah dipertemuan ilmiah terindeks global	-	2	3	4	5
					1.5c.2	Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	-	1	2	3	4
					1.5c.3	Jumlah KTI diterbitkan di prossiding ilmiah terindeks global	-	1	2	3	4

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
							2019	2020	2021	2022	2024
					1.5c.4	Jumlah Buku Ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal	-	1	2	3	4
					1.5c.5	Jumlah Pemakalah dipertemuan ilmiah eksternal instansi	-	14	15	16	17
					1.5c.6	Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	-	10	12	14	16
					1.5c.7	Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	-	2	3	4	5
					1.5c.8	Jumlah Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal	-	1	2	3	4
			6	Meningkatnya Fungsi Konservasi KR Sriwijaya	1.6.1	Jumlah Jenis Tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya	540	567	595	626	657

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
							2019	2020	2021	2022	2024
			7	Meningkatnya Fungsi Pelayanan Inkubator (STP)	1.7.1	Jumlah Jenis Pelayanan STP yang dimanfaatkan	4	4	4	4	4
			8	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pendanaan Star Up	1.8.1	Jumlah Star Up yang mendapatkan insentif/Pendanaan	3	3	3	3	3

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Balitbangda menunjukkan bagaimana cara Balitbangda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Balitbangda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Balitbangda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Balitbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Balitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu kebijakan dan strategi Balitbangda, meliputi:



Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Balitbangda Provinsi Sumsel Tahun 2019-2024

VISI : Sumsel Maju Untuk Semua			
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Inovasi dan Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan 2. Meningkatkan Ekosistem Inovasi 3. Meningkatkan Hasil Litbang yang Terpublikasi 4. Meningkatkan Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan 5. Meningkatkan Fungsi Konservasi Kebun Raya Sriwijaya 6. Meningkatkan Fungsi Pelayanan Inkubator STP 7. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pendanaan Start-Up	1. Mendorong kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah diaplikasikan 2. Mendorong penyelenggaraan publikasi hasil-hasil penelitian 3. Memfasilitasi pengembangan produk inovasi 4. Meningkatkan kerjasama ABGL 5. Mendorong penerapan SIDa melalui komitmen Kepala Daerah 6. Meningkatkan fungsi pelayanan Litbang dan UPTB dalam Pelayanan 7. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Litbang dan diseminasi hasil-hasil Litbang 8. Meningkatkan jejaring kerjasama kelembagaan dengan stakeholders terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan Litbang 9. Meningkatkan kuantitas dan atau kualitas informasi dan media 10. Meningkatkan Penciptaan dan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi dalam penyelenggaraan	1. Penyediaan kajian dan analisis kebijakan Iptek didasarkan pada isu-isu yang membutuhkan solusi yang responsif dan antisipatif. 2. Penguatan implementasi kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis. 3. Pengembangan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek 4. Penguatan Inkubator Teknologi 5. Peningkatan TRL Produk Inovasi 6. Penguatan Implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 7. Peningkatan kolaborasi dan sinkronisasi hasil litbat yang di manfaatkan oleh OPD dan stakeholder terkait 8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Litbang dan UPTB untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pengguna 9. Perluasan kerjasama dengan Lemlit PT, Lembaga vertikal Pusat, Dunia Usaha 10. Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka



VISI : Sumsel Maju Untuk Semua			
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pemerintahan	meningkatkan kemampuan dalam penciptaan inovasi dan iptek 11. Peningkatan kapasitas tenaga fungsional peneliti dan pejabat struktural dalam rangka mendukung kegiatan Litbang di daerah 12. Penyediaan dan penyebarluasan inovasi 13. Peningkatan Kualitas Layanan UPTB STP 14. Peningkatan Fungsi UPTB KRS

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada awal tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berpedoman pada IKU yang ditetapkan. Pada pertengahan tahun 2024 dilakukan perubahan IKU sebagai hasil dari penyusunan cascading. Revisi IKU 2024 ini menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Perubahan ini secara substansi selaras dengan Renstra Balitbangda Prov. Sumsel.

FORMULIR PERJANJIAN KERJASAMA KEPALA BADAN
BALITBANGDA PROV. SUMSEL TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) – 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Jabatan : Kepala Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. A. FATONI.,M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dr. Drs. A. Fatoni.,M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. Drs. H. Alamsyah, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680619 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

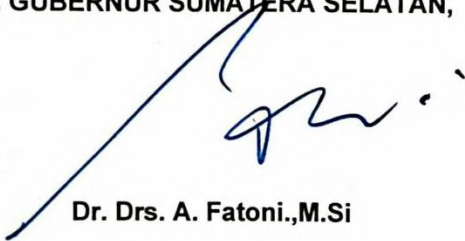
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.1	Meningkatnya Invensi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah	1.1.1	Indeks Inovasi Daerah	83,29
1.2	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.2.1	Nilai Ekosistem Inovasi	2,72
		1.2.2	Persentase Kab/Kota yang Mengimplementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	76%
		1.2.3	Persentase Jenis Komoditi Unggulan yang memiliki Klaster Inovasi	40%
		1.2.4	Persentase OPD yang bekerjasama dalam pilot project pengembangan SIDa	35%
		1.2.5	Persentase peningkatan PKS/MoU	65%
		1.2.6	Persentase Peningkatan Program kegiatan yang bersinergi	100%
		1.2.7	Persentase klister inovasi yang memiliki dukungan kebijakan (dukungan SDM, dana dan sarpras)	33%
		1.2.8	Persentase OPD yang memiliki Inovasi Pelayanan	73%
		1.2.9	Persentase OPD yang memiliki SDM Pelayanan Publik ber Kompeten	50%
		1.2.10	Persentase Inovasi yang didukung oleh Regulasi	100%
1.3	Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian yang Dimanfaatkan	1.3.1	Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang Dimanfaatkan	100%
		1.3.2	Jumlah Polycy Brief/Naskah/Kajian Akademik yang dihasilkan	6 Dokumen
1.4	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang Terpublikasi	1.4.1	Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding, Jurnal, Produk Inovasi)	100%
1.5	Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Kebun Raya	1.5.1	Luas Zona Koleksi yang di Kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi, bioregion, Tematik atau Kombinasi)	60 Ha
		1.5.2	Jumlah Koleksi Tumbuhan yang di Tanam	700 Spesimen
		1.5.3	Jumlah Pengguna Layanan Perkebunrayaan	2000 Pengguna
		1.5.4	Jumlah Koleksi Herbarium	30 Spesimen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi	1.6.1	Persentase tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 16.167.279.250,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 155.640.000,-	APBD

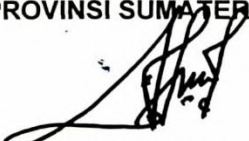
Palembang, 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Dr. Drs. A. Fatoni.,M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. Drs. H. Alamsyah, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680619 199303 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BALITBANGDA TAHUN 2024

Pengukuran Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja/tapkin yang disusun setiap tahunnya dan membandingkannya dengan target yang ada pada Tapkin tersebut. Pengukuran ini juga ditujukan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balitbangda Prov. Sumsel dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Prov. Sumsel beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Kinerja Daerah Balitbangda Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Perencanaan dan penganggaran tahun 2024 merupakan tahun awal periode RPD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Tahun 2023 bahwa sistem Evaluasi Kinerja Balitbangda masih harus ditingkatkan khususnya dalam hal evaluasi kinerja. Untuk menjawab rekomendasi ini, Balitbangda Prov. Sumsel melakukan berbagai upaya perbaikan salah satunya melalui pemantuan kinerja melalui rapat Laporan Harian, monev mingguan, bulanan, triwulan dan juga melalui Aplikasi E kinerja.

3.1.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024, Balitbangda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

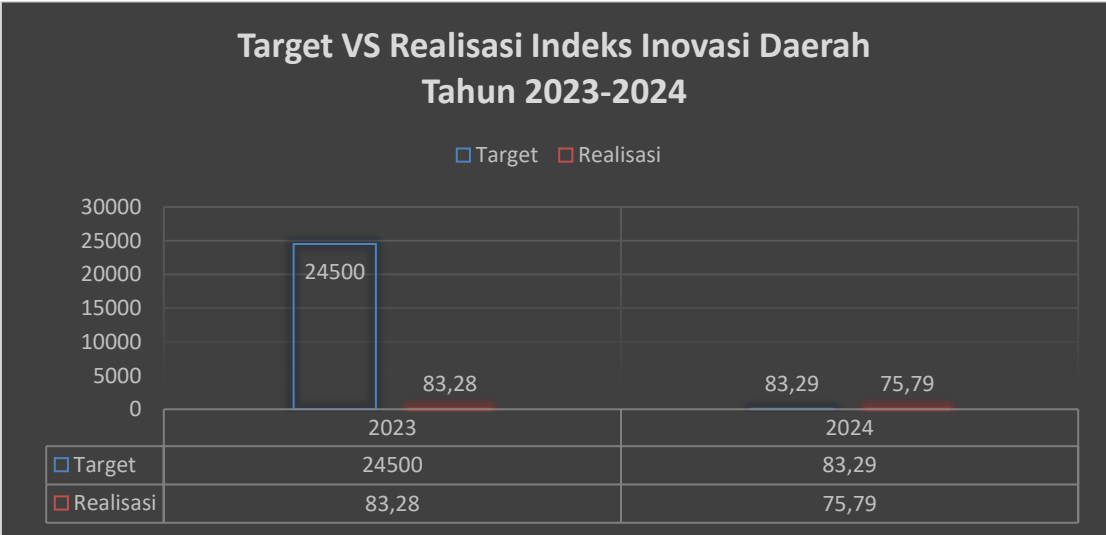
3.1.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN BALITBANGDA PROV. SUMSEL

I. SASARAN 1.1: MENINGKATKAN INVENSI DAN INOVASI BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Tujuan Meningkatkan Invenisi dan Inovasi bagi Pembangunan Daerah yaitu Indeks Inovasi Daerah.

1. INDEKS INOVASI DAERAH

Salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Invenisi dan Inovasi bagi Pembangunan Daerah** yaitu **Indeks Inovasi Daerah**. **Indeks Inovasi Daerah** adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan Kategori di tahun 2018-2020 Indeks Inovasi Daerah > 1000 Sangat Inovatif, > 500 Inovatif dan ≤ 500, sementara di tahun 2021-2024 sistem range penilaian Indeks Inovasi Daerah > 60 Sangat Inovatif, > 30 Inovatif, ≤ 30 Kurang Inovatif.



Berdasarkan Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa angka target Indeks dibeberapa tahun mengalami perubahan mengikuti pola penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri. Penetapan target di awal penyusunan Renstra pada tahun 2019 dilakukan sebelum Nilai Indeks Inovasi Daerah dirilis, sehingga angka target yang ditetapkan menggunakan range angka 1 digit, yaitu 8,4 - 9 untuk kategori Sangat Inovatif. Namun pada tahun 2020 setelah Nilai Indeks Inovasi dirilis, penilaian menggunakan range angka Ribuan, dimulai dari > 1000 untuk kategori Sangat inovatif, sementara di tahun 2021 juga ternyata perubahan nilai kategori

yaitu menggunakan angka puluhan, dimulai dari > 60 Sangat Inovatif, sehingga terjadi perbedaan nilai antara target dan realisasi pada tahun 2019-2021, sementara untuk melakukan perubahan target pada RPJMD dan Renstra tidak dimungkinkan waktunya. Namun secara predikat target yang ditetapkan setiap tahunnya merupakan target untuk kategori Provinsi Sangat Inovatif. Pada Tahun 2021 dilakukan penyusunan RPJMD perubahan dimana OPD berkesempatan untuk melakukan penyesuaian target di Tahun 2022-2024, dimana target 2022-2024 menggunakan base line data indeks inovasi tahun 2020, menggunakan angka ribuan, namun setelah RPJMD perubahan disahkan, Data Penilaian Indeks Inovasi Daerah rilis dengan menggunakan angka puluhan untuk kategori Provinsi Sangat Inovatif, dengan demikian secara angka pun tidak dapat dibandingkan, namun secara predikat masih dapat dilakukan perbandingan terhadap realisasi capaian kinerja indeks inovasi daerah.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Indikator Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan tahun 2024 menggunakan angka puluhan yaitu > 60 untuk kategori Provinsi Sangat Inovatif. Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target skor 83,29, sementara realisasi capaiannya berada pada skor 75,79 dengan kategori Provinsi Sangat Inovatif atau masuk dalam 10 besar sebagai Provinsi Terinovatif secara Nasional berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024.

Analisis ketercapaian kinerja tujuan : Meningkatnya Inovasi Dan Inovasi Dalam Pembangunan pada Indikator Indeks Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja sebesar 75,79, sementara target yang ditetapkan Balitbangda di bawah nilai pencapaian tahun 2024 yaitu 83,29, atau masuk dalam kategori 10 besar provinsi sangat inovatif, dengan angka pencapaian tersebut dengan demikian realisasi target terhadap target yang telah ditetapkan Balitbangda Provinsi Sumsel tahun 2024 tidak tercapai.

Untuk Realisasi tahun lalu (2023) sebesar 83,28 sementara tahun 2024 target sebesar 83,29. Terjadi Kenaikan Skor sebesar 0,01 yang masuk dalam kategori Sangat Inovatif secara nasional dan Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam 10 besar peringkat kategori tersebut.

Adapun faktor penyebab penurunan Skor capaian realisasi dibanding tahun 2023 sbb :

1. Evaluasi terhadap capaian nilai-nilai indikator-indikator Inovasi daerah yang masih rendah,
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengembangan riset dan inovasi,
3. Kualitas inovasi yang masih rendah membuat pemanfaatan produk inovasi belum optimal,
4. Inovasi yang diterapkan belum mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Tujuan **Meningkatnya Inovasi Dan Inovasi Dalam Pembangunan pada Indikator Indeks Inovasi Daerah** turut didukung oleh Program Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melalui sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan Pembinaan dan pendampingan kepada OPD, Perguruan Tinggi, Sekolah dan Lemlit untuk peningkatan inovasi daerah. Selain dilaksanakannya pembinaan dan pendampingan juga dilaksanakan pemilihan inovasi dan inovator guna memberikan stimulasi kepada para peneliti khususnya, akademis dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan budaya inovasi sekaligus menjaring inovasi-inovasi yang ada sehingga dapat disosialisasikan dan didiseminasikan kepada pengguna inovasi melalui tayangan Podcast “One Day One Innovation” pada chanel Youtube.

Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program ini dapat digambarkan sebagai berikut :

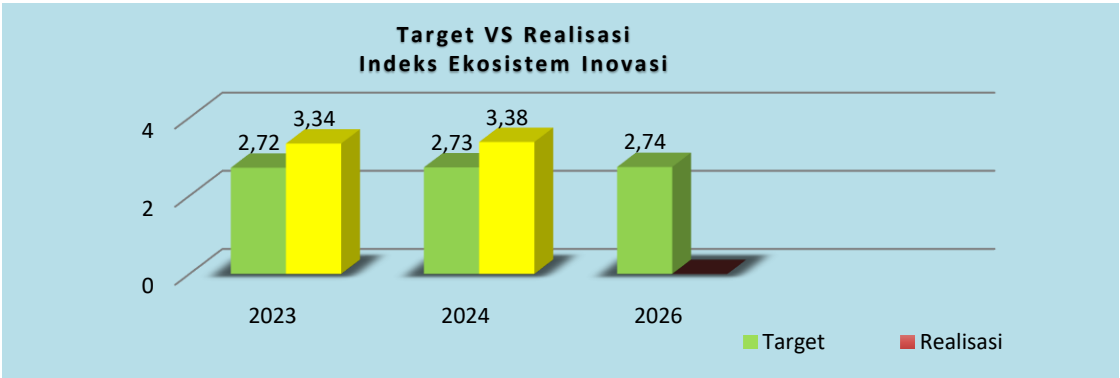
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pembinaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	1 Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen Rekomendasi

II. SASARAN 1.2 : MENINGKATNNYA EKOSISTEM INOVASI

1. NILAI EKOSISTEM INOVASI

Untuk mendukung tercapainya sasaran **Meningkatnya Ekosistem Inovasi** digunakan indikator nilai Ekosistem Inovasi. Ekosistem Inovasi merupakan salah satu komponen dari pengukuran Indeks Data Saing Daerah yang terdiri dari 2 Pilar yaitu Pilar Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Jika dilihat dari Tupoksi litbang maka nilai ekosistem Inovasi dapat diukur melalui Nilai Kapabilitas Inovasi, yang memuat indikator publikasi ilmiah, belanja riset, pengembangan klaster inovasi. Adapun range pengukuran nilai ekosistem inovasi (kapabilitas Inovasi) yaitu 5 – 1 (Tinggi – Rendah).



Analisis ketercapaian kinerja Sasaran : “Meningkatnya Ekosistem Inovasi” adalah sebagai berikut :

Tahun 2024 target capaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi dilihat dari pilar Kapabilitas Inovasi yaitu 2,72, sementara capaian realisasi yaitu 3,38 (*angka sementara*). Jika dilihat dari angka realisasi capaian indikator tersebut telah melebihi

target sebesar 0,66 atau 25% dari target yang ditetapkan. Upaya pencapaian kinerja dari indikator Meningkatnya Ekosistem Inovasi didukung oleh 4 yaitu kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kab/kota Tahun 2024, Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dan Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Faktor pendukung pencapaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi yaitu :

1. Tersedianya meta data yang menjadi dasar dalam pengukuran Indeks Ekosistem Inovasi
2. Adanya pendampingan kepada OPD Kab/kota terkait instrument pengukuran indeks Ekosistem Inovasi

Jika dilihat dari Tabel di atas bila dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja indikator Indeks Ekosistem Inovasi pilar Kapabilitas Inovasi di tahun 2024 naik sebesar 0,04 atau 1,2% dimana pada tahun 2023 capaian indikator indeks Inovasi sebesar 3,34 sementara di tahun 2024 sebesar 3,38. Dan pada Tahun 2026, di akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) target Indeks Ekosistem Inovasi yang ditetapkan yaitu 2,74, sementara capaian di tahun 2024 telah melebihi target.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi skor indeks ekosistem inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap capaian nasional berada di atas angka nasional, angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,10 (*angka sementara*) sementara pemerintah provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,38.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kab/kota Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan/pendampingan Indeks Daya Saing Daerah	1 Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen Rekomendasi
	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan	100 Inovasi	100 Inovasi
	Jumlah produk unggulan yang dikalengkan	120 Inovator	120 Inovator
	Jumlah Kerjasama Inovasi	5 kab/kota	5 kab/kota
	Jumlah teknologi yang didifusikan		
	Jumlah Kerjasama Kemitraan		
	Jumlah jurnal yang diterbitkan	2 Edisi Terbit, 365 Inovasi	2 Edisi Terbit, 365 Inovasi
	Jumlah Publikasi Hasil litbang dan Inovasi		

Indikator **Jumlah Database Kelitbangan yang dikelola** merupakan indikator kinerja utama di Tahun 2024 yang termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II, munculnya indikator ini salah satu tujuannya yaitu untuk kebutuhan perhitungan

kebutuhan Fungsional Analis Data Ilmiah di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Permen PAN & RB No.86 Tahun 2020. Target indikator **Jumlah Database Kelitbangan yang dikelola** tahun 2024 yaitu 10 database, sementara realisasi capaiannya yaitu 10 database atau tercapai 100 % hanya saja capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Tahun lalu karena indikator ini adalah indikator baru di tahun 2024.

Analisis ketercapaian kinerja Meningkatnya Inovasi Dan Inovasi Dalam Pembangunan pada Indikator Jumlah Database Kelitbangan yang dikelola adalah sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja sebesar 10 data base, yaitu Database Inovasi, Database Penelitian Database Tenant, Database PKS/MoU, Database HKI/KI, Database Teknologi, Database kluster inovasi, Database Produk inovasi, Database koleksi tanaman Kebun Raya, Database koleksi Herbarium Kebun Raya, sementara target yang ditetapkan Balitbangda 10 database, dengan angka pencapaian tersebut dengan demikian realisasi target terhadap target yang telah ditetapkan Balitbangda Provinsi Sumsel telah tercapai 100%

Tahun lalu (2022) Indikator Jumlah Database Kelitbangan yang dikelola belum ada, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022.

Keberhasilan capaian kinerja dari Tujuan **Meningkatnya Inovasi Dan Inovasi Dalam Pembangunan** didukung oleh Program Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melalui sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan melaksanakan kegiatan Identifikasi Database Inovasi, Database Penelitian Database Tenant, Database PKS/MoU, Database HKI/KI, Database Teknologi, Database kluster inovasi, Database Produk inovasi, Database koleksi tanaman Kebun Raya, Database koleksi Herbarium Kebun Raya.

Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangdan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang teridentifikasi	10 Data Kelitbangan dan Peraturan	10 Data Kelitbangan dan Peraturan

2. JUMLAH DATA ILMIAH YANG DIANALISIS

Indikator **Jumlah Data Ilmiah yang dianalisis** merupakan indikator kinerja baru yang termuat di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II, munculnya indikator ini salah satu tujuannya yaitu untuk kebutuhan perhitungan kebutuhan Fungsional Analis Data Ilmiah di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Permen PAN & RB No. 86 Tahun 2020. Target indikator **Jumlah Data Ilmiah yang dianalisis** tahun 2024 yaitu 12 data ilmiah, sementara realisasi capaiannya yaitu 12 data ilmiah atau tercapai 100 % hanya saja capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Tahun lalu karena indikator ini adalah indikator baru di tahun 2024.

Analisis ketercapaian kinerja Meningkatnya Invensi Dan Inovasi Dalam Pembangunan pada Indikator Jumlah Daya Ilmiah yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Data dan fasilitas kesehatan, klinik swasta, puskesmas pembantu, dan bidan,
2. Data dokter spesialis , dokter umum, dokter gigi, bidan per Kabupaten,
3. Data distribusi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidang per Kabupaten,
4. Data inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta menuju UHC,
5. Data besaran PAD pada APBD Perubahan,
6. Data anggaran untuk PBI APBD Provinsi,
7. Data anggaran untuk PBI APBD Kabupaten/Kota,
8. Data kunjungan RJTP di semua fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS,
9. Data kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Akses FKTP bagi masyarakat,
10. Data Jumlah dan jenis kepersertaan JKN,
11. Data Inovasi atau terobosan-terobosan yang dilaksanakan oleh BPJS,
12. Data hambatan pendataan, pendanaan, koordinasi dan kerjasama.

Keberhasilan capaian kinerja dari Tujuan Meningkatnya Invensi Dan Inovasi Dalam Pembangunan didukung oleh Program Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melalui sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan melaksanakan kegiatan Penelitian Survey Jaminan Kesehatan Menuju UHC Di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 dokumen	1 dokumen

3.1.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER SASARAN BALITBANGDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

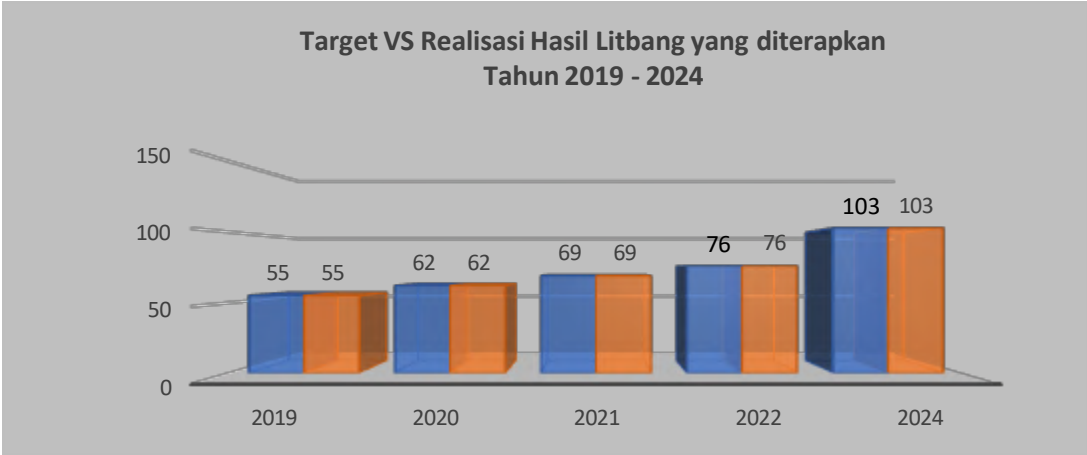
SASARAN 2 MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN/KAJIAN YANG DIMANFAATKAN

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan yaitu jumlah hasil litbang yang diterapkan. Adapun definisi operasional indikator jumlah hasil litbang yang diterapkan yaitu hasil-hasil litbang (teknologi/model/inovasi) yang dihasilkan oleh lembaga litbang/akademisi/inovator hanya sebatas diterapkan/didifusikan, masih dalam proses uji coba teknologi/inovasi/model. Untuk mengukur Capaian indikator jumlah hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan yaitu perbandingan antara Jumlah Hasil Litbang yang diterapkan dengan Target hasil litbang yang diterapkan pada tahun berjalan.

Tabel 3.6 Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2024 :

No	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah hasil litbang yang diterapkan	20	20	100%

Capaian Indikator kinerja dari sasaran **Meningkatnya Hasil Penelitian yang dimanfaatkan** adalah sebagai berikut :



1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan

Analisis indikator kinerja dari sasaran **Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan** pada indikator **Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang dimanfaatkan sbb :**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 target Jumlah Hasil Litbang yang dimanfaatkan yang sebanyak 20 hasil litbang atau secara kumulatif 103 hasil litbang yang dimanfaatkan, terjadi perbedaan angka target pada dokumen RPJMD Perubahan Periode 2022-2024, dikarenakan target PK merupakan Target capaian Per Tahun sementara di Dokumen RPJMD Perubahan merupakan target kumulatif dari Tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian jika dilihat dari target tiap-tiap tahun dimulai dari tahun 2019 – 2022 angka kenaikan berjumlah 7 hasil litbang, sementara di tahun 2024 terdapat kenaikan dari 7 hasil litbang menjadi 20 hasil litbang, terdapat penambahan target sebesar 13 hasil litbang yang dimanfaatkan pada tahun 2024 atau secara kumulatif 103 hasil litbang yang dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan permintaan akan hasil litbang di Tahun 2024 mengalami Peningkatan, sehingga di pertengahan Tahun terjadi perubahan target Perjanjian Kinerja di tataran Esselon 2. Meski demikian target kinerja tersebut dapat dicapai yaitu 20 hasil litbang yang dimanfaatkan atau secara kumulatif 103 inovasi dan atau sebesar 100 %. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan sebesar 103 inovasi atau 20 inovasi pada tahun berjalan dengan target yang ditetapkan sebesar 103 inovasi atau 20 inovasi pada tahun berjalan.

- ❖ 20 Inovasi yang diterapkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
- o Inovasi Pengalengan Pindang Honey
 - o Inovasi Pengalengan Pindang Serani Ogan Ilir
 - o Inovasi Pengalengan Pindang Burung Ogan Komering Ilir
 - o Inovasi Pengalengan Pindang Udang
 - o Inovasi Pengalengan Malbi (Peh Kaka)

- o Inovasi Pengalengan Tempoyak Sambal Ogan Komering Ulu Timur dan Lahat
- o Inovasi Pengalengan Gulai Ayam Nanas Lahat (Dusun Laman)
- o Inovasi Pembuatan Sabun Padat Bidara (Rumah Daun)
- o Inovasi Pempek Retort Honey
- o Inovasi Nugget Lele dengan Introduksi Gambir sebagai Pengawet Alami
- o Inovasi Pengalengan Nanas Prabumulih
- o Inovasi Pembuatan Sabun Cair Bidara
- o Inovasi Hilirisasi Produk berbahan baku Cabe
- o Inovasi Packaging Ikan Asin
- o Inovasi Digitalisasi E-Commerce
- o Inovasi Pewarna Alami Tekstil Berbahan Baku Tanaman Khas Kebun Raya Sriwijaya
- o Inovasi Si Bayar Uang
- o Inovasi Pembuatan Pakan Ikan Mandiri Berbahan Baku Lokal
- o Inovasi Breeding (Inseminasi Buatan) pada ternak Sapi
- o Inovasi Model Revitalisasi dan Pengembangan Dasawisma PKK

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian target Kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2024 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1.	Jumlah Hasil Litbang yang dimanfaatkan	76	83	103/20	100%	83	100%

Target yang ditetapkan merupakan angka kumulatif dari tahun sebelumnya atau target tahun berjalan ditambah capaian kumulatif tahun sebelumnya. Ukuran realisasi indikator kinerja jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan pada tahun berjalan ditambah dengan tahun sebelumnya, sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan dengan target yang ditetapkan.

Dilihat dari tabel di atas realisasi kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka realisasi telah mencapai 100%.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ke-3 antara lain sebagai berikut :

1. Adanya Sinergi kegiatan dengan kab/kota menentukan kebutuhan teknologi di daerah.
2. Adanya data kebutuhan teknologi di masyarakat khususnya UKM/IKM di Sumsel.
3. Dukungan data potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan baik dari hasil Penelitian di Universitas maupun para inventor.

4. Tersedianya Jejaring Intermediator Teknologi Sumsel

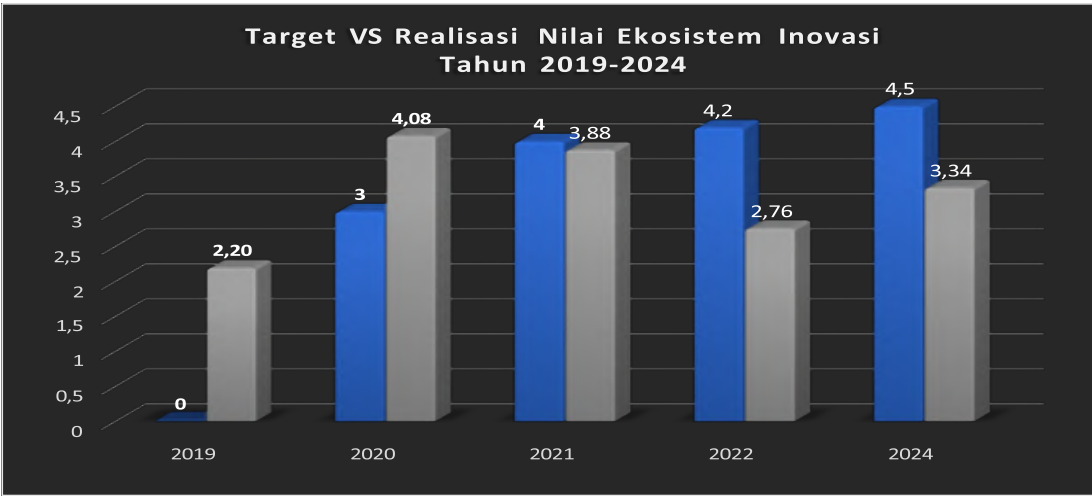
Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan Jumlah produk unggulan yang dikalengkan Jumlah Kerjasama Inovasi Jumlah teknologi yang didifusikan Jumlah Kerjasama Kemitraan	3 prototype 3 produk dalam kaleng 1 kerjasama 12 teknologi/inovasi 1 kerjasama kemitraan	3 prototype 3 produk dalam kaleng 3 kerjasama 12 teknologi/inovasi 3 kerjasama kemitraan
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil litbang yang diterapkan/didifusikan	5 teknologi/inovasi 2 teknologi/inovasi	5 teknologi/inovasi 2 teknologi/inovasi
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah hasil litbang yang diterapkan/didifusikan	1 teknologi/inovasi	1 teknologi/ Inovasi
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kajian Peraturan Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah hasil litbang yang diterapkan/didifusikan	1 teknologi/inovasi	1 teknologi/inovasi

SASARAN 2 : MENINGKATNYA EKOSISTEM INOVASI

1. Nilai Ekosistem Inovasi (Pilar Kapabilitas Inovasi)

Untuk mendukung tercapainya sasaran **Meningkatnya Ekosistem Inovasi** digunakan indikator nilai Ekosistem Inovasi. Ekosistem Inovasi merupakan salah satu

komponen dari pengukuran Indeks Daya Saing Daerah yang terdiri dari 2 Pilar yaitu Pilar Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Jika dilihat dari Tupoksi litbang maka nilai ekosistem Inovasi dapat diukur melalui Nilai Kapabilitas Inovasi, yang memuat indikator publikasi ilmiah, belanja riset, pengembangan klaster inovasi. Adapun range pengukuran nilai ekosistem inovasi (kapabilitas Inovasi) yaitu 5 – 1 (Tinggi – Rendah)



Analisis ketercapaian kinerja tujuan : “Meningkatnya Ekosistem Inovasi” adalah sebagai berikut :

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 Indikator Ekosistem Inovasi belum menjadi Indikator Kinerja Utama, baru pada tahun 2021, Indikator Nilai Ekosistem Inovasi merupakan Indikator baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ess II dan IKU sesuai dengan penyempurnaan cascading Balitbangda. Namun indikator tersebut ada di dalam dokumen Renstra Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Capaian Indikator Nilai Ekosistem Inovasi ini merupakan capaian kinerja crosscating artinya capaian kinerja sasaran ini juga didukung oleh stakeholder terkait antara lain OPD-OPD seperti PTSP, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Lainnya.

Dilihat dari Grafik di atas terjadi penurunan capaian target dari Tahun 2021 dan 2022. Target Indikator Nilai Ekosistem Inovasi tahun 2022 yaitu 4,2 sementara realisasi capaiannya berada pada nilai 2,76, angka capaian ini menurun sebesar 1,44 atau 62% dibanding tahun 2021 yang berada pada nilai 4.08. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pilar yaitu pilar Infrastruktur, pilar Keuangan dan pasar produk yang nilainya rendah, selain itu juga sejak Tahun 2022 Penilaian Indeks Daya Saing Daerah yang semula dilakukan oleh Kemenristek Dikti, di Tahun 2022 dilakukan oleh BRIN, yang secara mekanisme pengambilan data untuk penilaian Ekosistem Inovasi untuk masing-masing pilar diambil dari data Kementrian/lembaga tidak lagi menggunakan data yang disampaikan oleh OPD-OPD Provinsi.

Tahun 2024, Indikator Nilai Ekosistem Inovasi merupakan Indikator yang ditetapkan dalam IKU di Tahun 2024 sesuai dengan penyempurnaan cascading Balitbangda. Capaian Indikator Nilai Ekosistem Inovasi merupakan capaian kinerja crosscating artinya capaian kinerja sasaran ini juga didukung oleh stakeholder terkait antara lain OPD-OPD seperti PTSP, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Lainnya. Capaian Indikator Nilai Ekosistem Inovasi tahun 2024 yaitu 4,5 sementara realisasi capaiannya berada pada skor 3,34 atau berada di atas skors Nasional. Adapun sistem penilaian skors ekosistem inovasi berdasarkan beberapa indikator antara lain publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset dan pengembangan klaster yang datanya bersumber dari BPS, KemenkumHAM.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi skor ekosistem inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap capaian nasional berada di atas angka nasional, angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,02 sementara pemerintah provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,34.

Upaya pencapaian kinerja dari indikator Meningkatnya Ekosistem Inovasi didukung oleh kegiatan Penelitian dan Pengembangan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kab/kota Tahun 2024, Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dan Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Selain Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program ini dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Pengkajian Peraturan Sub kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kab/kota Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan/pendampingan Indeks Daya Saing Daerah	5 OPD 5 Lemlit 5 PT	5 OPD 5 Lemlit 4 PT
	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan	3 prototype	3 prototype
	Jumlah produk unggulan yang dikalengkan	3 produk dalam kaleng	3 produk dalam kaleng
	Jumlah Kerjasama Inovasi	1 kerjasama	3 kerjasama
	Jumlah teknologi yang didifusikan	1 teknologi	3 teknologi
	Jumlah Kerjasama Kemitraan	1 kerjasama kemitraan	3 kerjasama kemitraan
	Jumlah jurnal yang diterbitkan	2 Jurnal	2 Jurnal
	Jumlah Publikasi Hasil litbang dan Inovasi	365 inovasi	365 inovasi

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PRODUK INOVASI YANG SIAP DIPASARKAN

1. Jumlah Produk Inovasi yang dipasarkan

Tabel 3.7 Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2024 :



Analisis indikator kinerja dari sasaran **Meningkatnya Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan** adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2024 Indikator sasaran ke-3 yaitu jumlah prototype inovasi yang siap dipasarkan (memenuhi TRL level 9), target pada sasaran ini mengalami perubahan dari indikator Tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pertimbangan bahwa target tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya sudah tercapai, dan juga karena permintaan masyarakat untuk inovasi produk inovasi semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut maka kebutuhan SDM Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek di Balitbangda semakin banyak. Oleh karena itu untuk menghitung jumlah kebutuhan Pegawai dengan jabatan fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Di Balitbangda maka perlu dirumuskan kembali target yang akan dicapai untuk indikator pada sasaran 3. Untuk itu jika disandingkan dengan target yang ada di dalam RPJMD dan Rentsra Perubahan tidak selaras, dikarenakan untuk melakukan perubahan target di RPJMD dan Renstra Perubahan tidak dimungkinkan.

Berdasarkan Analisis di atas maka, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran meningkatnya produk inovasi yang ditetapkan sebanyak 16 prototype yang siap dipasarkan. Dan untuk realisasi capaian indikator sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 16 prototype atau 100% tercapai. Adapun prototype yang telah memenuhi TRL (level 9) adalah sebagai berikut :

No.	Teknologi	Produk
1.	Pengalengan Produk	Pindang Tangkep dalam kaleng
2.	Pengalengan Produk	Pindang Honey dalam kaleng
3.	Pengalengan Produk	Pindang Serani OI dalam kaleng
4.	Pengalengan Produk	Pindang Burung OKI dalam kaleng
5.	Pengalengan Produk	Pindang Udang BA dalam kaleng
6.	Pengalengan Produk	Malbi (Pehkaka) dalam kaleng
7.	Pengalengan Produk	Tempoyak Sambal OKUT dalam kaleng
8.	Pengalengan Produk	Tempoyak Sambal Lahat dalam kaleng
9.	Pengalengan Produk	Gulai Ayam Nanas Lahat dalam kaleng
10.	Formula / Pengemasan Produk	Proses Produksi dan Pengemasan Sabun Padat Bidara (Rumah Daun)
11.	Pengemasan Produk	Pengemasan Pempek Retort Honey
12.	Formula Produk	Nugget Lele dengan Introduksi Gambir sebagai Pengawet Alami
13.	Pengalengan Produk	Nanas Prabumulih dalam kaleng
14.	Formula Produk	Pewarna Tekstil Berbahan Baku Tanaman Khas Kebun Raya
15.	Formula Produk	Proses Produksi Bon Cabe
16.	Formula Produk	Pakan Ikan Mandiri Berbahan

Sementara jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja indikator produk yang memenuhi TRL level 9 atau siap dipasarkan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024 mengalami peningkatan target sebesar 15 prototype, bila target di tahun-tahun sebelumnya 1 prototype, di tahun 2024 target menjadi 16 prototype, sementara pencapaiannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tercapai 100%.

Dibandingkan dengan target akhir Renstra perubahan, yang ditargetkan yaitu 1 prototype sementara di Perjanjian Kinerja Ess II sebanyak 16 prototype, berdasarkan target capaian sampai dengan tahun 2024 artinya sudah terealisasi sebanyak 18 prototype, sehingga target akhir Renstra berhasil tercapai.

Adapun Analisis ketercapaian kinerja tujuan : Meningkatnya Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan adalah sebagai berikut :

1. Presentase capaian kinerja sebesar 100%, dari target yang ditetapkan yaitu 16 produk yang memenuhi TRL level 9 atau siap dipasarkan, dengan demikian realisasi terhadap target tercapai. Adapun faktor keberhasilan pencapaian target sasaran meningkatnya. Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan adalah sebagai berikut :
 1. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator yang belum terpenuhi
 2. Adanya Sistem Manajemen Kinerja yang terarah dan terukur
 3. Optimalisasi Kinerja ASN Balitbangda dan OPD dalam pemenuhan capaian indikator
 4. Adanya Sinergi Kegiatan dengan kab/kota menentukan kebutuhan teknologi di daerah
 5. Adanya data potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan baik dari universitas maupun inovator
 6. Adanya animo dari Pengguna akan inovasi
 7. Tersedianya Jejaring Intermediator Teknologi
 8. Adanya Sistem Manajemen Kinerja yang terarah dan terukur dari Pimpinan

Keberhasilan capaian kinerja dari indikator Meningkatnya Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan didukung oleh sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Bidang Pertanian melalui sub-sub kegiatan Pengembangan Inkubator Science Techno Park. Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program ini dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 3.9 Capaian Kinerja sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Pengembangan Teknologi dan Inovasi Sub Kegiatan : 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Bidang Pertanian			
Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi	1. Jumlah Tenant	16	16
	2. Jumlah Produk Inovasi yang dipasarkan	16	16

2. Jumlah Tenant yang diinkubasi

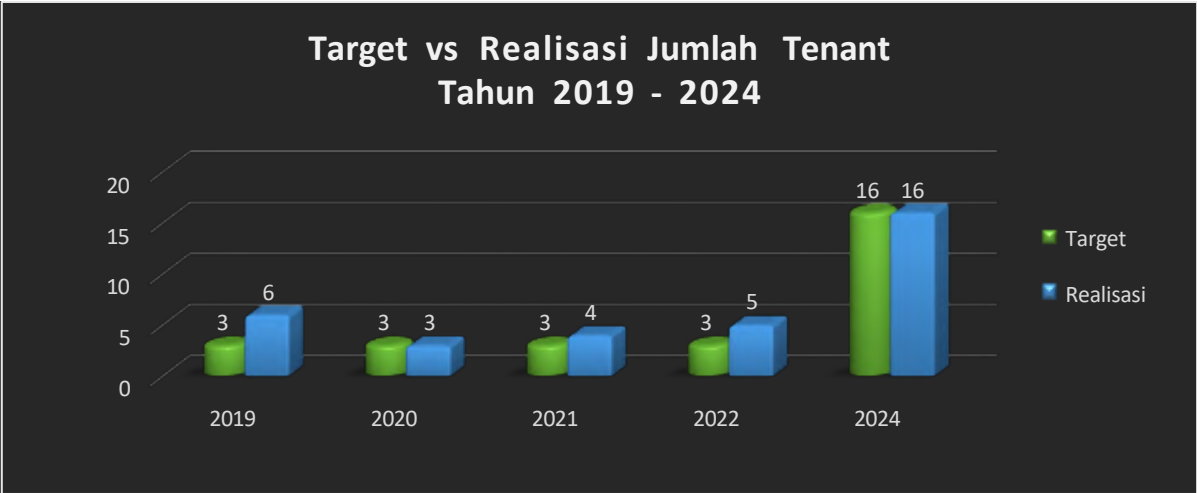
Tabel 3.8 Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2024 :

		2024		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Tenant yang diinkubasi	16 tenant	16 tenant	100%

Analisis indikator kinerja dari sasaran **Meningkatnya Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan** adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2024 Indikator sasaran ke-3 mengalami penambahan yaitu jumlah tenant, penambahan indikator ini pada Perjanjian Kinerja Ess II dikarenakan adanya kuntutk perhitungan kebutuhan Formasi Jabatan Analis Pemanfaatan Iptek di Balitbangda. Indikator Jumlah Tenant telah termuat di dalam Renstra Balitbangda tahun 2019-2024

namun tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja Ess II namun masuk di Perjanjian Kinerja Ess III. Oleh karena untuk menghitung jumlah kebutuhan Pegawai dengan jabatan fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Di Balitbangda maka dimasukan ke dalam Perjanjian Kinerja Ess II yang akan dicapai untuk indikator pada sasaran 3. Untuk itu jika disandingkan dengan target realiasi PK Ess II dan IKU Balitbangda ditahun-tahun sebelumnya indikator jumlah tenant ini tidak ada. Namun secara pencapaian target dapat disajikan datanya seperti grafik di bawah ini :



Berdasarkan Analisis di atas maka, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran meningkatnya Tenant yang diinkubasi yang ditetapkan sebanyak 16 tenant. Dan untuk realisasi capaian indikator sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 16 tenant atau 100% tercapai. Adapun jumlah tenant yang diinkubasi adalah sebagai berikut :

1. UKM Pindang Honey
2. UKM Pindang Serani OI
3. UKM Pindang Burung OKI
4. UKM Pindang Udang BA
5. UKM Malbi
6. UKM Tempoyak Sambal OKUT dan Lahat
7. UKM Gulai Ayam Nanas Lahat
8. UKM Sabun Padat dan Cair Bidara
9. UKM Pempek Retort Honey
10. UKM Nugget Lele dengan Introduksi Gambir sebagai Pengawet Alami
11. UKM Nanas Prabumulih
12. UKM Bubuk Cabe
13. UKM Ikan Asin
14. UKM Digitalisasi E-Commerce
15. UKM Pewarna Tekstil Berbahan Baku Tanaman Khas Kebun Raya
16. UKM Pakan Ikan Mandiri Berbahan Baku Lokal

Sementara jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja indikator tenant yang diinkubasi tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024 mengalami peningkatan target, bila target di tahun-tahun sebelumnya 3 tenant, di tahun 2024 target menjadi 16 tenant, sementara pencapaiannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tercapai 100%.

Dibandingkan dengan target akhir Renstra perubahan, yang ditargetkan yaitu 3 Tenant sementara di Perjanjian Kinerja Ess II sebanyak 16 tenant, berdasarkan target capaian sampai dengan tahun 2024 artinya sudah terealisasi sebanyak 16 tenant, sehingga target akhir Renstra berhasil tercapai.

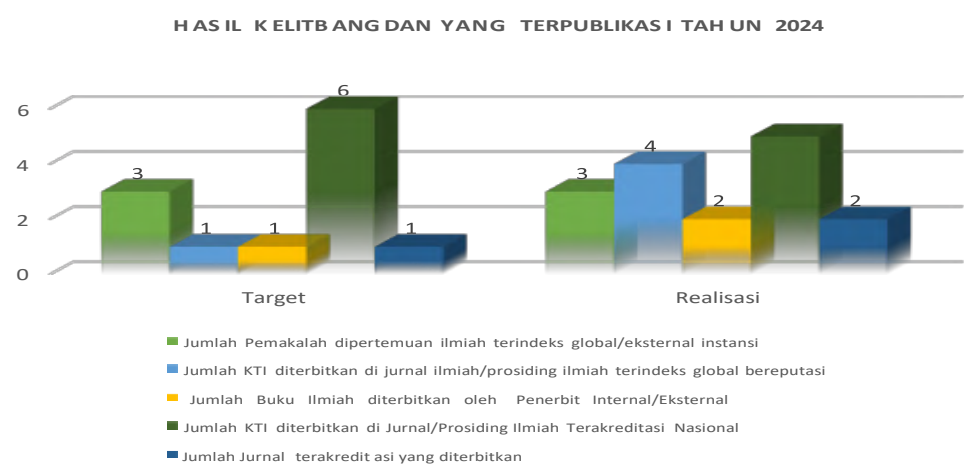
Presentase capaian kinerja sebesar 100%, dari target yang ditetapkan yaitu 16 produk yang memenuhi TRL level 9 atau siap dipasarkan, dengan demikian realisasi terhadap target tercapai. Adapun faktor keberhasilan pencapaian target sasaran meningkatnya. Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator yang belum terpenuhi
2. Adanya Sistem Manajemen Kinerja yang terarah dan terukur
3. Optimalisasi Kinerja ASN Balitbangda dan OPD dalam pemenuhan capaian indikator
4. Adanya Sinergi Kegiatan dengan kab/kota menentukan kebutuhan teknologi di daerah
5. Adanya data potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan baik dari universitas maupun inovator
6. Adanya animo dari Pengguna akan inovasi
7. Tersedianya Jejaring Intermediator Teknologi
8. Adanya Sistem Manajemen Kinerja yang terarah dan terukur dari Pimpinan

Keberhasilan capaian kinerja dari indikator Jumlah Tenant didukung oleh sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Bidang Pertanian melalui sub-sub kegiatan Pengembangan Inkubator Science Techno Park. Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 3.9 Capaian Kinerja sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Pengembangan Teknologi dan Inovasi Sub Kegiatan : 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Bidang Pertanian			
Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi	1. Jumlah Tenant 2. Jumlah Produk Inovasi yang dipasarkan	16 16	16 16

SASARAN 4 : MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN YANG TERPUBLIKASI



Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Sasaran **Meningkatnya Hasil Kelitbangan Yang Terpublikasi** sebagai sasaran baru yang ditetapkan pada IKU 2024 dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan. Untuk mendukung tercapainya sasaran ini Balitbangda melaksanakan Program dan Kegiatan

Diseminasi Hasil Litbang baik melalui Kegiatan Pengelolaan Jurnal maupun Publikasi di Media Elektronik dan Massa. Dilihat pada tabel di atas, Tahun 2024 capaian realisasi sasaran ke-4 tercapai 100%, dimana realisasi semua Indikator Sasaran Capaian melebihi dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran 4 tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024 target yang ditetapkan relatif sama, dan pencapaiannya fluktuatif tiap tahunnya, beberapa indikator ada yang tercapai 100% ada yang belum tercapai 100 dikarenakan beberapa faktor antara lain KTI/jurnal masih direvier dan masih dalam tahap daftar tunggu dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tercapai 90 - 100%.

Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra perubahan, yang ditargetkan yaitu sebanyak 17 Pemakalah, 5 KTI, 4 Buku Ilmiah, 5 KTI Akreditasi nasional dan 5 KTI prosiding ilmiah, berdasarkan target capaian sampai dengan tahun 2024 secara akumulatif 90% tercapai yaitu 12 Pemakalah, 5 KTI, 2 Buku Ilmiah, 5 KTI Akreditasi nasional dan 5 KTI prosiding, sehingga target akhir Renstra berhasil tercapai 98%.

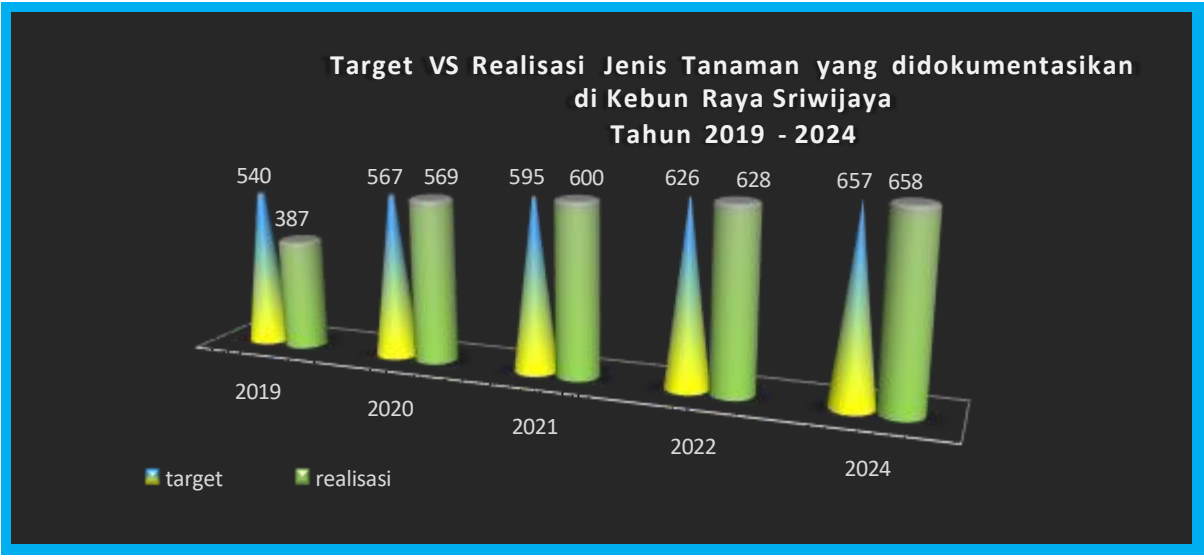
Keberhasilan capaian kinerja dari indikator Meningkatnya Hasil Kelitbangan Yang Terpublikasi didukung oleh Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan sub-sub kegiatan Pengelolaan E Jurnal dan Publikasi Hasil Litbang. Pencapaian target dan indikator pada sasaran ini tidak hanya didukung dan dilaksanakan oleh Balitbang saja, melainkan juga hasil kelitbangan berupa jurnal, prosiding, buku juga dipublikasi melalui media atau jurnal mitra lemlit lainnya. Kondisi ini juga menjadi kendala atau hambatan bagi peneliti karena besarnya biaya jurnal, waktu penerbitan dan persyaratan publikasi menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target sasaran ini.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA FUNGSI KONSERVASI KEBUN RAYA SRIWIJAYA

Tabel 3.11 Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2024

		2024		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di kebun raya	657	657	100%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target indikator jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di kebun raya pada tahun 2024 menetapkan 657 jenis tanaman sementara realisasi capaian berjumlah 657 jenis tanaman yang terdokumentasi/pelabelan atau **tercapai 100%** dari target yang ditetapkan.



Analisis indikator kinerja dari sasaran **Meningkatnya Fungsi Konservasi Kebun Raya Sriwijaya adalah sebagai berikut:**

Target yang ditetapkan merupakan jumlah akumulatif jenis tanaman yang terdokumentasi di Kebun Raya Sriwijaya. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan naik menjadi 657 jenis atau bertambah 62 jenis dari tahun sebelumnya. Ukuran realisasi indikator kinerja jumlah Jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya pada tahun berjalan ditambah dengan tahun sebelumnya, Sedangkan ukurannya adalah perbandingan antara persentase realisasi kinerja jumlah Jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 capaian persentase kinerja jumlah Jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya mencapai target 658. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi kinerja jumlah Jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya sampai dengan Tahun 2022 sebesar 628 pada tahun berjalan dengan target yang ditetapkan sebesar 595 jenis tanaman.

Indikator sasaran Jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya Sriwijaya Balitbangda dilihat dari tabel di atas capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penambahan 28 jenis tanaman dari Tahun 2022. Sementara jika realisasi kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka realisasi baru telah mencapai 100%

Adapun faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1. Pengaturan waktu dan tempat pelaksanaan eksplorasi yang tepat.
- 2. Ketersediaan Sarana dan prasarana eksplorasi
- 3. Dukungan dari pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal

SASARAN 6 : MENINGKATNYA KAPASITAS FUNGSI KELEMBAGAAN,
KETATALAKSANAAN, DAN SUMBER DAYA ORGANISASI

Sasaran ke 6 merupakan sasaran pendukung dalam upaya pencapaian tujuan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Dan Sumber Daya Organisasi** diukur dengan capaian Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran dan indikator ini merupakan Perjanjian Kinerja baru yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Ess II dengan tujuan agar pencapaian kinerja tahun 2024 tidak hanya berfokus pada pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis saja, tapi juga perlu didukung dengan pencapaian kinerja di bidang Pelayanan Umun dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Target dan Realiasi Capaian kinerja Indikator ini termuat dalam Rentrtra Perubahan Balitbangda Tahun 2019-2024.

a. NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)



Analisis indikator kinerja dari sasaran **Meningkatnya Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan** adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Grafik di atas maka, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Dan Sumber Daya Organisasi** pada indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 yaitu BB atau 80, sementara realisasi capaian mendapat nilai A atau 88 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Sementara jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja indikator Nilai Sakip tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 19 %. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan capaian target dikarenakan peralihan dokumen perencanaan dan SDM di lingkungan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, sehingga pada prosesnya masih diperlukan penyempurnaan pada dokumen perencanaan dan adaptasi SDM di bidang perencanaan. Dan ditahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja Sakip terus mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra perubahan, yang ditargetkan yaitu 80 atau BB berdasarkan target capaian sampai dengan tahun 2024 artinya sudah terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan atau 100% tercapai. Adapun faktor keberhasilan pencapaian target sasaran meningkatnya Nilai Sakip Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perencanaan melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi Ke Menpan dan inspektorat, benchmaking/studi tiru dan Bimtek,
2. Adanya dukungan dan monitoring pimpinan terhadap pencapaian target kinerja,
3. Adanya Monev dan pembinaan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan capaian kinerja dari indikator Nilai Sakip didukung oleh sub kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**. Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5 laporan

b. NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



Berdasarkan Grafik di atas maka, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Dan Sumber Daya Organisasi pada indikator Nilai SKM yaitu B atau 3, sementara realisasi capaian mendapat nilai B atau 3 berdasarkan hasil Laporan SKM Pelayanan Inkubator Teknologi dan Pelayanan Science Techno Park Sriwijaya.

Sementara jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja indikator Nilai SKM tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja masih berada di Nilai B. Dan

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra perubahan, yang ditargetkan yaitu B berdasarkan target capaian sampai dengan tahun 2024 artinya sudah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan atau 100% tercapai. Adapun faktor keberhasilan pencapaian target sasaran melalui indikator Nilai SKM Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Tersedianya SDM bidang Pelayanan
2. Tersedianya SOP/Prosedur Pelayanan
3. Tersedianya Form Pelayanan Berbasis Digital

3.2. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BALITBANGDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

Berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2024 alokasi untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 16.611.582.240,-** (*enam belas milyar enam ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp.	16.256.179.640,-	
Belanja Modal	: Rp.	355.402.000,-	
Total Anggaran	: Rp.	16.611.582.240,-	
Realisasi	: Rp.	15.476.207.648,-	(93,17%)
a. Belanja Operasi	: Rp.	15.124.765.048,-	(91,05%)
b. Belanja Modal	: Rp.	351.442.600,-	(2,12%)

Realisasi keuangan sebesar **Rp. 15.476.207.648,-** (*lima belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut, realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 15.124.765.048,- (*lima belas milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah*) atau 91,05%, sedangkan realisasi keuangan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 351.442.600,- (*tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*) atau 2,12 %. Bila dilihat dari target belanja, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 15.124.765.048,- atau 93,04% dari total pagu belanja operasi, sementara realisasi capaian belanja modal sebesar Rp. 351.442.600- atau 98,89% dari total pagu belanja modal.

Tabel 3.15. Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15,424,697,876	100.00	93.30	14,391,805,046
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,000,000	100.00	97.71	22,473,170
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	100.00	96.42	4,821,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	100.00	97.26	4,863,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,000,000	100.00	98.38	12,789,170
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,866,790,834	100.00	91.95	9,991,538,550
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,765,333,770	100.00	91.89	9,891,783,950
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101,457,064	100.00	98.32	99,754,600
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	100.00	79.00	7,900,000
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	100.00	79.00	7,900,000
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	849,100,682	100.00	98.11	833,052,308
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	100.00	99.85	9,985,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279,170,000	100.00	99.28	277,170,000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95,000,000	100.00	99.33	94,360,600
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67,000,000	100.00	99.95	66,964,700
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	100.00	98.28	1,965,600
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395,930,682	100.00	96.63	382,606,408
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76,232,600	100.00	97.43	74,272,600
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,650,000	100.00	94.65	34,690,000
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39,582,600	100.00	100.00	39,582,600
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,797,974,000	100.00	98.93	2,768,040,521
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	100.00	100.00	3,000,000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540,000,000	100.00	94.76	511,693,521
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,254,974,000	100.00	99.93	2,253,347,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801,599,760	100.00	86.64	694,527,897
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312,400,000	100.00	74.03	231,256,702
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,000,000	100.00	46.43	20,894,385
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167,457,260	100.00	99.37	166,407,260
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,163,000	100.00	99.96	99,124,300
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177,579,500	100.00	99.59	176,845,250

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1,186,884,364	100.00	91.37	1,084,402,602
i	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	211,400,000	100.00	99.51	210,357,728
23	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Penyusunan Perda Brida)	82,740,000	100.00	99.89	82,645,696

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
24	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	9,600,000	100.00	92.13	8,844,647
25	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	70,000,000	100.00	99.85	69,896,542
26	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	49,060,000	100.00	99.82	48,970,843
ii	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	188,033,000	100.00	71.48	134,401,192
27	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kajian Issue Strategis Kesehatan dan Stunting)	137,850,000	100.00	75.82	104,518,192
28	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	50,183,000	100.00	59.55	29,883,000
iii	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	276,022,500	100.00	96.97	267,657,741
29	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Pakan Ternak dan Pertanian, Perkebunan dan Pangan)	100,000,000	100.00	99.29	99,288,550
30	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Hilirisasi Produk)	76,022,500	100.00	98.09	74,568,401
31	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Eksplorasi, Kajian Karbon dan Pewarna Alami)	100,000,000	100.00	93.80	93,800,790

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
iv	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	511,428,864	100.00	92.29	471,985,941
32	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Inkubator)	58,009,678	100.00	90.51	52,505,468
33	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Pemilihan Inovator)	188,469,186	100.00	99.37	187,287,540
34	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Publikasi Hasil Litbang, E-Jurnal dan Podcast One day One Inovation)	264,950,000	100.00	87.64	232,192,933
	Jumlah : 34 kegiatan	16,611,582,240	100.00	93.17	15,476,207,648

Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan bahwa secara umum penyerapan anggaran sudah Sangat Baik atau terserap $\geq 90\%$. Berdasarkan Tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari 34 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, ada 30 kegiatan yang tercapai $\geq 80\%$ dan sementara 4 kegiatan yang belum terlaksana dengan optimal yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kajian Issue Strategis Kesehatan dan Stunting), dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tercatat dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) Tahun 2024.

2. Dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, 34 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

Adapun faktor Pendorong Pencapaian Keberhasilan Penyerapan Anggaran secara umum antara lain :

1. Ketepatan dalam Perencanaan Anggaran,
2. Adanya monitoring dan Evaluasi secara berkala dalam penyerapan anggaran,
3. Kecepatan SDM dalam Pengelolaan dan Penyelesaian Administrasi Keuangan, dan
4. Adanya Sistem Manajemen Kinerja yang terarah dan terukur

Sementara faktor Penghambat Pencapaian Keberhasilan Penyerapan Anggaran secara umum sebagai berikut :

1. Adanya transisi sistem Keuangan sehingga dibutuhkan penyesuaian,
2. Mutasi/Penempatan SDM masih belum dilaksanakan secara optimal,
3. Tahap intervensi dan evaluasi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu penyelesaian sebagai akibat terlambat dimulainya kegiatan, sehingga ada anggaran yang telah direncanakan tidak dapat terserap sesuai target yang ditetapkan.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

3.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2024

a. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Balitbangda Provinsi Sumsel melakukan upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja, antara lain melalui

1. Melakukan proses penawaran ke Penyedia yang penawaran lebih rendah dari harga yang ditawarkan,
2. Mengajukan harga sesuai dengan di E-Katalog.
3. Memilih produk yang jauh lebih murah namun secara kualitas sama dengan merk produk yang lebih mahal.
4. Melakukan rapat secara online melalui zoom meeting bersama peserta dan narasumber rapat.
5. Melakukan kolaborasi kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam 1 waktu secara bersamaan namun tidak mengurangi output yang ingin dicapai.

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir tahun 2023 memiliki kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang dengan 35 Sub kegiatan. Sementara Tahun 2024 jumlah SDM yang tersedia sampai akhir Tahun 2024 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang dengan 34 sub kegiatan. Sementara alokasi penambahan pegawai belum terpenuhi sesuai permintaan. Kondisi ini membuat beberapa SDM merangkap jabatan atau tugas fungsi serta tanggung jawab. Namun hal ini dapat teratasi melalui pembinaan dan pengawasan yang intensif kepada Pegawai yang merangkap Jabatan, tugas dan tanggung jawab tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BALITBANGDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang secara rinci sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Tujuan “**Meningkatnya Invensi Dan Inovasi Dalam Pembangunan**” Pada Indikator :
 - a. Indeks Inovasi Daerah, Berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 Realisasi capaian kinerja Indikator Indeks Inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 75,79 dari target yang ditetapkan Balitbangda yaitu 83,29 yang dimana Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam Kategori Provinsi “**SANGAT INOVATIF**” secara Nasional.
 - b. Jumlah Database Kelitbangan yang dikelola, Realisasi capaian kinerja sebesar 10 data base, yaitu Database Inovasi, Database Penelitian Database Tenant, Database PKS/MoU, Database HKI/KI, Database Teknologi, Database kluster inovasi, Database Produk inovasi, Database koleksi tanaman Kebun Raya, Database koleksi Herbarium Kebun Raya, sementara target yang ditetapkan Balitbangda 10 database atau tercapai 100%, hanya saja capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Tahun lalu karena indikator
 - c. Jumlah Data Ilmiah Yang Dianalisis, Target indikator Jumlah Data Ilmiah yang dianalisis tahun 2024 yaitu 12 data ilmiah, sementara realisasi capaiannya yaitu 12 data ilmiah atau tercapai 100 % hanya saja capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Tahun lalu karena indikator ini adalah indikator baru di tahun 2024.
2. Capaian Kinerja Sasaran ke- 1 “**Meningkatnya Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan**” pada indikotor jumlah hasil litbang yang diterapkan, jika dilihat dari target tiap-tiap tahun dimulai dari tahun 2019 – 2022 angka kenaikan berjumlah 7 hasil litbang, sementara di tahun 2024 terdapat kenaikan dari 7 hasil litbang menjadi 20 hasil litbang, terdapat penambahan target sebesar 13 hasil litbang yang dimanfaatkan pada tahun 2024 atau secara kumulatif 103 hasil litbang yang dimanfaatkan. Hal ini

dikarenakan permintaan akan hasil litbang di Tahun 2024 mengalami Peningkatan, sehingga di pertengahan Tahun terjadi perubahan target Perjanjian Kinerja di tataran Esselon 2. Meski demikian target kinerja tersebut dapat dicapai yaitu 20 hasil litbang yang dimanfaatkan atau secara kumulatif 103 inovasi atau tercapai sebesar 100 %.

3. Capaian sasaran 2 “**Meningkatnya Ekosistem Inovasi**” digunakan indikator nilai Ekosistem Inovasi. Ekosistem Inovasi merupakan salah satu komponen dari pengukuran Indeks Data Saing Daerah yang terdiri dari 2 Pilar yaitu Pilar Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Jika dilihat dari Tufoksi litbang maka nilai ekosistem Inovasi dapat diukur melalui Nilai Kapabilitas Inovasi. Capaian Indikator Nilai Ekosistem Inovasi tahun 2024 yaitu 4,5 sementara realisasi capaiannya berada pada skor 3,34 atau belum mencapai target. Namun Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi skor ekosistem inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap capaian nasional berada di atas angka nasional, angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,02 sementara pemerintah provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,34.
4. Capaian Sasaran ke- 3 “**Meningkatnya Produk Inovasi Yang Siap Dipasarkan**” pada indikator :
 - a. Jumlah Produk Inovasi yang dipasarkan, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran meningkatnya produk inovasi yang ditetapkan sebanyak 16 prototype yang siap dipasarkan. Dan untuk realisasi capaian indikator sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 16 prototype atau 100% tercapai.
 - b. Jumlah Tenant yang diinkubasi, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran meningkatnya Tenant yang diinkubasi yang ditetapkan sebanyak 16 tenant. Dan untuk realisasi capaian indikator sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 16 tenant atau 100%.
5. Capaian Sasaran ke- 4 “**Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi**” Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran 4 tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024 target yang ditetapkan relatif sama, dan pencapaiannya fluktuatif tiap tahunnya, beberapa indikator ada yang tercapai 100% ada yang belum tercapai 100 dikarenakan beberapa faktor antara lain KTI/jurnal masih direvier dan masih dalam tahap daftar tunggu dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tercapai 90 - 100%.

6. Capaian Sasaran ke- 5 “Meningkatnya Fungsi Konservasi Kebun Raya Sriwijaya” Pada tahun 2024 capaian persentase kinerja jumlah Jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya mencapai target 658. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi kinerja jumlah Jenis tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya sampai dengan Tahun 2022 sebesar 628 pada tahun berjalan dengan target yang ditetapkan sebesar 595 jenis tanaman.
7. Capaian Sasaran ke- 6 “Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Dan Sumber Daya Organisasi” pada indikator :
- a. Nilai SAKIP, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Dan Sumber Daya Organisasi pada indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 yaitu BB atau 80, sementara realisasi capaian mendapat nilai A atau 88 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
 - b. Nilai SKM, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Dan Sumber Daya Organisasi pada indikator Nilai SKM yaitu B atau 3, sementara realisasi capaian mendapat nilai B atau 3 atau 100% tercapai. berdasarkan hasil Laporan SKM Pelayanan Inkubator Teknologi dan Pelayanan Science Techno Park Sriwijaya.
3. Capaian Keuangan, Dari 34 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, ada 30 kegiatan yang tercapai ≥ 80 % dan sementara 4 kegiatan yang belum terlaksana dengan optimal yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kajian Issue Strategis Kesehatan dan Stunting), dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tercatat dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) Tahun 2024. Dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, 34 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun mendatang.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BALITBANGDA Provinsi Sumatera Selatan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Kepala Badan, Pejabat Struktural dan Fungsional serta

seluruh Staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Demikian Laporan Akuntabilitas BALITBANGDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2024.

B. Rekomendasi

1. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder yang terlibat dalam pencapaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah, Komponen Ekosistem Inovasi, Pilar Kapabilitas Inovasi.
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan untuk data indikator Ekosistem Inovasi, Kapabilitas Inovasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Membentuk Jejaring Pengelolaan E-Jurnal baik Nasional maupun Internasional untuk Publikasi Karya Tulis Ilmiah/KTI.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Monitoring dan Evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan Program/kegiatan sampai dengan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan baik secara berkala maupun setiap bulan.
5. Melakukan Inovasi untuk peningkatan Kinerja baik untuk peningkatan kinerja program/kegiatan Penelitian dan Pengembangan maupun dalam Kegiatan Operasional/pelayanan.
6. Meningkatkan Pengembangan Kompetensi SDM melalui Study tiru, Bimtek atau diklat-diklat lainnya.
7. Meningkatkan Kerjasama atau kemitraan dengan Stakeholder lainnya untuk peningkatan sarana dan prasarana UPTB baik melalui CSR, Dana Insentif dan sejenisnya.